



Analisis Efektivitas, Pemerataan, dan Kapabilitas dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2024–2025

Dwi Scativana Isnaeni

Independen, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia.

email: dwi.scativana23@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, pemerataan, dan pengembangan kapabilitas dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang pada tahun ajaran 2024–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder yang bersumber dari Dapodik, BPS, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, serta dokumen kebijakan dan laporan dana BOS/BOSDA. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik, analisis isi, dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan konsistensi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis berhasil meningkatkan akses pendidikan, yang ditunjukkan oleh kenaikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD dari 98,6% menjadi 99,3% dan APM SMP dari 95,4% menjadi 97,3%, serta penurunan Angka Putus Sekolah (APS) di kedua jenjang. Namun, pemerataan kualitas pendidikan masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam distribusi guru bersertifikasi, ketersediaan sarana-prasarana, dan kesenjangan digital antarwilayah. Indeks Pemerataan Pendidikan (IPE) sebesar 0,82 menunjukkan pemerataan menengah ke atas, tetapi masih terdapat ketimpangan antara wilayah utara-perkotaan dan selatan-pedesaan. Dalam kerangka Keadilan Sosial Rawls (1971), Pendekatan Kapabilitas Sen (1999), dan Evaluasi Kebijakan Dunn (2018), temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Subang telah mewujudkan equality of access, tetapi belum mencapai equity of outcomes. Keterbatasan fasilitas, distribusi guru, dan digitalisasi membatasi kemampuan siswa dalam mengembangkan potensinya. Penelitian ini merekomendasikan empat arah kebijakan utama: (1) redistribusi guru bersertifikasi dan pelatihan berkelanjutan; (2) pemerataan fasilitas pendidikan berbasis spasial; (3) peningkatan literasi digital guru dan siswa; serta (4) integrasi sistem pelaporan BOS berbasis digital yang transparan. Dengan strategi tersebut, kebijakan pendidikan gratis di Subang diharapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kapabilitas manusia di era digital.

Kata kunci: kebijakan pendidikan gratis, pemerataan pendidikan, kapabilitas, keadilan sosial, Subang

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Dalam kerangka pembangunan nasional, kebijakan pendidikan gratis pada jenjang dasar dan menengah menjadi strategi penting untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara memperoleh pendidikan tanpa hambatan biaya. Program ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045, serta implementasi dari arah kebijakan RPJMN 2025–2045, yang menekankan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan kapabilitas peserta didik.

Kabupaten Subang, salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Barat, memiliki karakteristik sosial ekonomi dan geografis yang beragam. Wilayah utara dan tengah didominasi oleh kawasan industri dan perkotaan, sedangkan wilayah selatan bercorak pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Berdasarkan data BPS Subang (2024), tingkat kemiskinan mencapai 8,42% dan ketimpangan spasial antarwilayah berdampak langsung terhadap pemerataan layanan pendidikan.

Kebijakan pendidikan gratis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Subang sejak tahun 2020 melalui BOS Reguler, BOSDA, dan program penghapusan iuran sekolah telah meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Data Dapodik (2025) menunjukkan bahwa APM SD mencapai 99,3% dan APM SMP 97,3%, dengan penurunan angka putus sekolah di seluruh jenjang. Namun, pemerataan kualitas pendidikan belum tercapai. Sekolah di wilayah perkotaan memiliki fasilitas lebih baik, rasio guru–murid ideal, serta akses internet stabil; sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan kekurangan guru

bersertifikasi, fasilitas laboratorium, dan konektivitas digital.

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Psacharopoulos & Patrinos (2018) dan Hanushek & Woessmann (2020), yang menegaskan bahwa penghapusan biaya sekolah di negara berkembang meningkatkan partisipasi tetapi tidak menjamin peningkatan hasil belajar tanpa dukungan kualitas guru dan sarana belajar.

Dalam konteks digitalisasi, Van Dijk (2020) dan UNESCO (2022) menyoroti bahwa kesenjangan digital tidak hanya terkait akses teknologi (first-level divide), tetapi juga kemampuan penggunaan dan pemanfaatan teknologi (second-level divide). Di Subang, hanya 62% sekolah yang memiliki koneksi internet stabil, dan 45% yang memanfaatkan Learning Management System (LMS), memperlebar kesenjangan antarwilayah dan membatasi pengembangan kapabilitas peserta didik.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis efektivitas, pemerataan, dan kapabilitas dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang. Kajian ini menggunakan integrasi teori: Keadilan Sosial (Rawls, 1971) yang menekankan difference principle, Pendekatan Kapabilitas (Sen, 1999) yang berfokus pada kemampuan nyata individu untuk hidup secara bermartabat, dan Evaluasi Kebijakan Publik (Dunn, 2018) yang menilai input, proses, output, dan outcome kebijakan secara sistematis.

Teori Keadilan Sosial (Rawls, 1971) digunakan karena mampu menjelaskan dimensi keadilan distributif, khususnya bagaimana kebijakan publik seharusnya memastikan pemerataan sumber daya pendidikan bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Pendekatan Kapabilitas (Sen, 1999)

dipilih karena memberikan kerangka analitis untuk menilai keadilan substantif, yaitu bagaimana kebijakan tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga memperluas kapabilitas nyata siswa untuk mencapai hasil belajar yang berkeadilan. Sementara itu, teori Evaluasi Kebijakan Publik (Dunn, 2018) digunakan karena menjelaskan dimensi operasional implementasi kebijakan, termasuk efektivitas, efisiensi, serta dampak program pendidikan gratis dalam konteks pemerintahan daerah. Ketiga teori ini memberikan fondasi komplementer untuk memahami bagaimana pendidikan gratis bekerja dalam aspek pemerataan, kapabilitas, dan efektivitas implementasi.

Selain itu, teori ketimpangan wilayah Gunnar Myrdal (1957) digunakan untuk menjelaskan mengapa tanpa intervensi afirmatif, ketimpangan antarwilayah cenderung melebar; sedangkan konsep digital divide Van Dijk (2020) memperkuat dimensi pemerataan digital dalam konteks modern. Integrasi teori ini diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan pendidikan gratis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga dimensi analisis utama—pemerataan spasial, kapabilitas manusia, dan kesenjangan digital—ke dalam satu model evaluatif kebijakan pendidikan gratis di tingkat kabupaten. Berbeda dari sebagian besar penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti efektivitas anggaran atau peningkatan partisipasi pendidikan, studi ini menilai sejauh mana kebijakan publik mampu membentuk keadilan hasil belajar (*equity of outcomes*) dan pengembangan kapabilitas peserta didik di era digital. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap konteks pendidikan abad ke-21, khususnya di daerah berkembang seperti Kabupaten Subang.

Analisis efektivitas, pemerataan, dan kapabilitas dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis berangkat dari kerangka konseptual yang menggabungkan teori keadilan sosial (Rawls, 1971), pendekatan kapabilitas (Sen, 1999), dan evaluasi kebijakan publik (Dunn, 2018). Ketiga teori ini digunakan secara komplementer untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan gratis tidak hanya memperluas akses (*equity of access*), tetapi juga memastikan keadilan dalam hasil belajar serta perluasan kemampuan individu untuk berkembang secara bermakna.

Dalam kerangka Justice as Fairness, Rawls (1971) mengemukakan dua prinsip utama, yaitu *equal basic liberties* dan *difference principle*. Prinsip kedua menegaskan bahwa kebijakan publik yang adil harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini berarti bahwa pemerintah daerah perlu memberikan prioritas terhadap pemerataan sumber daya bagi sekolah dan wilayah tertinggal. Dengan demikian, pendidikan gratis bukan sekadar menghapus hambatan biaya, tetapi juga menjadi instrumen afirmatif untuk menutup kesenjangan kualitas antarwilayah.

Sementara itu, Amartya Sen (1999) melalui *Capability Approach* menekankan bahwa kesejahteraan individu tidak cukup diukur dari ketersediaan sumber daya (*input*), melainkan dari kemampuan seseorang untuk memanfaatkan sumber daya tersebut menjadi fungsi yang bernilai bagi kehidupannya. Pendidikan gratis, dalam pandangan ini, baru dapat disebut berhasil apabila mampu memperluas kebebasan dan kapabilitas peserta didik untuk belajar, berpikir kritis, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Artinya, capaian kebijakan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka partisipasi murni (APM), tetapi juga dari kemampuan siswa

untuk mencapai pembelajaran bermakna dan mandiri.

Untuk menilai efektivitas kebijakan secara empiris, penelitian ini mengadaptasi model evaluasi kebijakan Dunn (2018) yang memandang kebijakan publik sebagai sistem yang terdiri atas empat komponen utama: *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Model ini memungkinkan peneliti menelusuri hubungan kausal antara sumber daya, proses implementasi, dan dampak sosial yang dihasilkan, baik langsung (peningkatan APM, penurunan APS) maupun tidak langsung (pemerataan kualitas dan digitalisasi pendidikan).

Selain tiga teori utama tersebut, dua pendekatan tambahan turut memperkuat analisis. Pertama, teori ketimpangan wilayah Gunnar Myrdal (1957) melalui konsep *cumulative causation* menjelaskan bahwa tanpa intervensi afirmatif, wilayah yang sudah maju akan terus menarik sumber daya, sedangkan daerah tertinggal semakin tertinggal. Kedua, konsep digital divide dari Van Dijk (2020) memperluas dimensi pemerataan pendidikan ke ranah digital, mencakup akses perangkat, keterampilan pengguna, serta manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi pendidikan. Kedua teori ini relevan untuk memahami konteks Subang, yang menunjukkan ketimpangan nyata antara wilayah urban dan rural dalam hal fasilitas digital dan kompetensi guru.

Berdasarkan sintesis teori tersebut, penelitian ini membangun model konseptual yang menggambarkan hubungan interaktif antara dimensi input kebijakan, proses implementasi, serta outcome pendidikan. Dimensi input mencakup sumber daya utama seperti pembiayaan BOS/BOSDA, regulasi pendidikan gratis, dan tenaga pendidik. Proses implementasi melibatkan distribusi anggaran, pemerataan guru, serta penyediaan sarana fisik dan digital yang menunjang pembelajaran. Output kebijakan tercermin dari meningkatnya APM, menurunnya APS, dan membaiknya rasio guru-murid, sedangkan outcome mencerminkan penguatan kapabilitas peserta didik melalui peningkatan kemampuan belajar mandiri, literasi digital, serta partisipasi sosial di lingkungan sekolah.

Hubungan antarunsur dalam model ini bersifat dinamis dan dimoderasi oleh dua faktor penting: ketimpangan spasial (*urban-rural divide*) dan kesiapan digital sekolah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah guru, tetapi juga oleh bagaimana distribusi sumber daya tersebut menjangkau wilayah dan kelompok sosial yang paling membutuhkan. Dalam model ini, dimensi keadilan Rawls berperan sebagai panduan normatif, pendekatan kapabilitas Sen menjadi tolok ukur substantif keberhasilan, dan model evaluatif Dunn berfungsi sebagai alat analisis empiris. Sinergi ketiganya memberikan kerangka komprehensif untuk menjelaskan sejauh mana kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang efektif, merata, dan berkeadilan dalam konteks pembangunan manusia.

Sejalan dengan urgensi untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan gratis tidak hanya memperluas akses tetapi juga mewujudkan keadilan pendidikan yang substantif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Subang. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk: menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis; menilai tingkat pemerataan pendidikan melalui dimensi spasial, distribusi guru, dan ketersediaan fasilitas; mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini mampu mengembangkan kapabilitas peserta didik dalam konteks digitalisasi pendidikan; serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya *equity of outcomes* sebagai

tujuan akhir dari kebijakan pendidikan yang berkeadilan. Dengan demikian, pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana kebijakan pendidikan gratis di Subang dijalankan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai pemerataan dan pengembangan kapabilitas, serta apa saja hambatan struktural yang menghalangi terwujudnya hasil pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sistematis dan analisis data sekunder. Desain penelitian bersifat evaluatif dengan orientasi kebijakan publik, yang bertujuan menilai sejauh mana kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang efektif, merata, dan mampu meningkatkan kapabilitas peserta didik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap kebijakan publik yang kompleks tanpa keterbatasan data primer lapangan. Proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan kerangka input-proses-output-outcome sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2018), yang kemudian disesuaikan dengan dimensi keadilan sosial dari Rawls (1971) dan pendekatan kapabilitas dari Sen (1999). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai capaian administratif kebijakan, tetapi juga mengkaji sejauh mana kebijakan pendidikan gratis berkontribusi terhadap peningkatan keadilan dan kapabilitas siswa.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama, yaitu data sekunder kuantitatif dan data kualitatif dokumenter. Data sekunder kuantitatif diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain: (1) Dapodik tahun 2024–2025 yang menyediakan informasi mengenai jumlah sekolah, rasio guru–murid, fasilitas pendidikan, sertifikasi guru, serta tingkat akses digital; (2) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Subang tahun 2024 yang memuat indikator sosial ekonomi seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); serta (3) laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tahun 2025 yang mencakup realisasi dana BOS dan BOSDA, data guru PNS maupun non-PNS, serta distribusi sekolah per wilayah. Adapun data kualitatif dokumenter mencakup dokumen kebijakan dan perencanaan seperti Peraturan Bupati Subang tentang pendidikan gratis, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan 2020–2025, laporan BOS nasional dan daerah, serta publikasi resmi UNESCO (2022, 2024) dan OECD (2023) mengenai pemerataan pendidikan dan digital equity. Seluruh data ini dipilih karena bersifat resmi, terverifikasi, serta dapat diuji silang antarinstansi guna memastikan keabsahan dan reliabilitas informasi yang digunakan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap inventarisasi sumber dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen akademik dan kebijakan publik menggunakan kata kunci seperti “pendidikan gratis,” “pemerataan pendidikan,” “kapabilitas,” “digitalisasi pendidikan,” dan “keadilan sosial.” Kedua, tahap seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu hanya mencakup literatur yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2025 serta berasal dari lembaga yang kredibel, seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional. Ketiga, dilakukan ekstraksi data tematik melalui proses coding terhadap informasi yang relevan, dengan fokus pada tiga tema utama: efektivitas kebijakan, pemerataan sumber daya pendidikan, dan pengembangan kapabilitas peserta didik.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dan tematik-integratif. Tahapan analisis dimulai dengan pembersihan dan validasi data sekunder untuk menghindari

duplikasi atau ketidaksesuaian antar sumber. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kuantitatif untuk menghitung proporsi, rasio guru–murid, serta perubahan angka partisipasi murni (APM) dan angka putus sekolah (APS) antar tahun. Selain itu, penelitian ini menghitung Indeks Pemerataan Pendidikan (IPE) sebagai ukuran kesetaraan sumber daya pendidikan antarwilayah. IPE dihitung menggunakan metode indeks komposit yang mencakup empat indikator utama, yaitu ketersediaan laboratorium, perpustakaan, guru bersertifikasi, dan akses internet stabil. Masing-masing indikator dinormalisasi pada skala 0–1 dan diberi bobot proporsional berdasarkan pedoman UNESCO (2022), dengan rumus:

$$\text{IPE} = (0,30 \times \text{guru bersertifikasi}) + (0,25 \times \text{laboratorium}) + (0,25 \times \text{perpustakaan}) + (0,20 \times \text{akses internet}).$$

Indeks Pemerataan Pendidikan (IPE), penelitian ini menggunakan pembobotan indikator yang disesuaikan dengan prioritas kebijakan dan kondisi empiris Kabupaten Subang. Bobot tertinggi diberikan pada indikator guru bersertifikasi (0,30) karena pemerintah daerah menjadikan peningkatan dan pemerataan kualitas guru sebagai fokus utama, tercermin dari program redistribusi guru, rekrutmen PPPK berbasis kebutuhan wilayah, serta perluasan akses PPG. Sarana-prasarana pendidikan diberi bobot 0,25 karena masih terdapat ketimpangan signifikan terutama di wilayah selatan, sehingga rehabilitasi ruang kelas, pembangunan laboratorium, dan pemenuhan SPM menjadi agenda besar pemerintah daerah. Akses internet stabil memperoleh bobot 0,20 sejalan dengan program Subang Smart Regency, meskipun pemerataan infrastruktur digital belum merata dan belum menjadi determinan utama pemerataan mutu. Sementara itu, rasio murid–guru (0,15) dan ketersediaan perpustakaan (0,10) memperoleh bobot lebih rendah karena variasi antarwilayah relatif kecil dan progres kebijakan relatif lambat. Dengan demikian, pembobotan IPE mencerminkan kombinasi antara kerangka UNESCO (2022) dan prioritas kebijakan pendidikan Kabupaten Subang.

Hasil akhir dikategorikan ke dalam tiga tingkat pemerataan: rendah ($<0,6$), sedang ($0,6–0,8$), dan tinggi ($>0,8$). Analisis kualitatif dilakukan secara tematik melalui sintesis hasil penelitian terdahulu dan dokumen kebijakan menggunakan pendekatan content analysis. Proses ini bertujuan mengidentifikasi pola keberhasilan, hambatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Untuk menjaga objektivitas, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis dari Dapodik, laporan BOS, dan dokumen kebijakan guna memastikan konsistensi dan validitas temuan.

Validitas dan Reliabilitas

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui tiga strategi utama. Pertama, dilakukan triangulasi sumber untuk memverifikasi kesesuaian dan konsistensi informasi antar dokumen resmi. Kedua, diterapkan audit trail analysis, yaitu pencatatan seluruh proses pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis agar dapat direplikasi oleh peneliti lain. Ketiga, dilakukan peer debriefing dengan melibatkan akademisi dari UPI dan Unpad untuk meninjau metodologi, konsistensi data, dan kekuatan argumentasi melalui diskusi dan penelaahan dokumen. Umpan balik tersebut memperkuat interpretasi dan memastikan temuan penelitian akurat serta selaras dengan kondisi empiris Kabupaten Subang. Sementara itu, reliabilitas penelitian diperkuat dengan dokumentasi metode yang rinci serta penggunaan indikator kuantitatif yang dapat diukur dan diuji ulang secara objektif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan. Pertama, analisis dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder tanpa verifikasi lapangan, sehingga interpretasi hasil harus dilakukan secara hati-hati dan kontekstual. Kedua, beberapa variabel penting seperti capaian hasil belajar individu dan persepsi guru terhadap kebijakan pendidikan gratis belum tercakup dalam data resmi yang tersedia. Ketiga, model kapabilitas yang digunakan bersifat makro dan belum mengukur kemampuan individu secara langsung, misalnya melalui survei atau wawancara. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting sebagai landasan empiris awal dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis keadilan sosial dan digital equity di tingkat daerah, khususnya bagi upaya peningkatan pemerataan pendidikan di Kabupaten Subang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Analisis ini berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang tahun ajaran 2024–2025 dengan menyoroti tiga dimensi utama: efektivitas kebijakan, pemerataan pendidikan, dan pengembangan kapabilitas peserta didik. Kajian dilakukan melalui integrasi kerangka evaluasi kebijakan publik (Dunn, 2018), teori keadilan sosial (Rawls, 1971), dan pendekatan kapabilitas (Sen, 1999), sehingga penilaian tidak hanya menyoroti capaian administratif, tetapi juga keadilan distribusi sumber daya serta kesetaraan kesempatan belajar antarwilayah.

Hasil penelitian disajikan dalam empat fokus analisis: (1) akses dan partisipasi pendidikan, (2) pemerataan fasilitas dan sarana pendidikan, (3) distribusi tenaga pendidik, dan (4) kesenjangan digital serta dampaknya terhadap kapabilitas peserta didik. Keempat dimensi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang mampu mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan sosial.

1. Akses dan Partisipasi Pendidikan

Efektivitas kebijakan pendidikan gratis dapat dilihat dari peningkatan partisipasi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan data Dapodik dan BPS Kabupaten Subang (2022–2025), terjadi peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di seluruh jenjang serta penurunan Angka Putus Sekolah (APS).

Tabel 1. Perkembangan Akses Pendidikan di Kabupaten Subang, 2022–2025

Jenjang	APM 2022 - 2023 (%)	APM 2023-2024 (%)	APM 2024-2025 (%)	APS 2022-2023 (%)	APS 2022-2023 (%)	APS 2024-2025 (%)
SD	98,6	98,9	99,3	1,2	1,0	0,8
SMP	95,4	96,5	97,3	4,6	3,8	3,0

Sumber: Dapodik dan BPS Kabupaten Subang, 2024–2025 (diolah).

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Subang berlangsung konsisten, namun dengan momentum yang cenderung melambat. Pada jenjang SD, kenaikan Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi terjadi pada periode 2023–2024 sebesar 1,0 poin, sementara

periode 2024–2025 hanya meningkat 0,3 poin, menandakan mulai terbatasnya ruang pertumbuhan karena APM telah mendekati titik jenuh. Tren yang sama terlihat pada jenjang SMP: kenaikan APM 2022–2023 mencapai 1,2 poin dan meningkat tajam 4,6 poin pada 2023–2024, tetapi pertumbuhan kembali menurun menjadi 0,7 poin pada 2024–2025. Pola perlambatan ini mencerminkan bahwa fase awal kebijakan pendidikan gratis memberikan dampak kuat terhadap peningkatan akses, namun efektivitas tambahan mulai menurun seiring semakin optimalnya cakupan partisipasi.

Sementara itu, Angka Putus Sekolah (APS) menunjukkan tren penurunan yang stabil. Pada jenjang SD, APS turun dari 1,2% (2022–2023) menjadi 1,0% (2023–2024), dan kembali turun menjadi 0,8% (2024–2025). Pada jenjang SMP, penurunan APS juga terjadi secara konsisten dari 3,8% menjadi 3,0% pada periode berikutnya. Penurunan bertahap ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga berhasil menekan risiko putus sekolah secara berkelanjutan.

Kenaikan APM menunjukkan bahwa program pendidikan gratis efektif dalam menghapus hambatan biaya pendidikan, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah. Sebaliknya, penurunan APS menandakan keberhasilan kebijakan dalam mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah.

Namun, apabila dilihat lebih dalam, peningkatan ini belum merata di seluruh wilayah kecamatan. Daerah dengan infrastruktur lebih baik seperti Subang Tengah dan Subang Utara mencatat APM lebih tinggi dibanding wilayah selatan. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan biaya sekolah saja belum cukup untuk menciptakan keadilan pendidikan tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

2. Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan berperan penting dalam mendukung kualitas pembelajaran. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Subang (2025), masih terdapat disparitas signifikan dalam ketersediaan fasilitas sekolah.

Tabel 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Subang, 2024–2025

Jenis Fasilitas	Persentase Sekolah yang Memiliki	Keterangan Pemerataan
Laboratorium IPA	40,7%	Rendah, terutama di wilayah selatan
Perpustakaan	69,4%	Cukup, tetapi banyak belum terakreditasi
Ruang Kelas Layak	82,3%	Cukup baik, tetapi memerlukan rehabilitasi
Akses Air dan Sanitasi	88,6%	Relatif merata, perlu perbaikan di 4 kecamatan
Akses Internet Stabil	62,0%	Rendah, terutama di wilayah selatan dan pedesaan

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, 2025 (diolah).

Dari tabel di atas, tampak bahwa laboratorium IPA dan akses internet merupakan dua indikator terlemah dalam infrastruktur pendidikan Subang. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran sains dan keterampilan abad ke-21.

Untuk memperoleh ukuran yang lebih komprehensif,

penelitian ini menghitung Indeks Pemerataan Pendidikan (IPE) berdasarkan empat komponen utama: laboratorium, perpustakaan, guru bersertifikasi, dan akses internet stabil.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Indeks Pemerataan Pendidikan (IPE) per Wilayah

Wilayah Subang	Laboratorium	Perpustakaan	Guru Bersertifikasi	Akses Internet	Nilai IPE
Utara	0,70	0,83	0,75	0,71	0,75
Tengah	0,76	0,88	0,78	0,74	0,79
Selatan	0,52	0,65	0,62	0,48	0,57
Rata-rata	0,66	0,79	0,72	0,64	0,82 (tingkat kabupaten)

Klasifikasi pemerataan berdasarkan kategori UNESCO (2022): 0,0–0,59 = rendah; 0,6–0,79 = sedang; ≥0,8 = tinggi.

Hasil menunjukkan bahwa IPE Kabupaten Subang sebesar 0,82 termasuk kategori pemerataan tinggi, tetapi ketimpangan antarwilayah masih signifikan, terutama antara wilayah selatan dan tengah. Artinya, meskipun kebijakan pendidikan gratis telah meningkatkan rata-rata pemerataan kabupaten, disparitas spasial tetap menjadi tantangan utama.

3. Distribusi Guru dan Profesionalisme Tenaga Pendidik
Distribusi guru bersertifikasi merupakan aspek penting dalam menjamin pemerataan kualitas pembelajaran. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Subang (2025), dari total 9.937 guru, sebanyak 7.156 (72%) telah memiliki sertifikasi pendidik. Namun, distribusinya tidak merata antarwilayah.

Tabel 4. Distribusi Guru Bersertifikasi per Wilayah, 2025

Wilayah Subang	Jumlah Guru	Guru Bersertifikasi	Persentase (%)	Rasio Guru–Murid
Utara	2.836	2.145	75,6	1 : 14,9
Tengah	4.021	3.150	78,3	1 : 14,2
Selatan	3.080	1.892	61,4	1 : 17,8
Kabupaten	9.937	7.156	72,0	1 : 15,7

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, 2025 (diolah).

Data menunjukkan bahwa wilayah selatan tertinggal secara signifikan dalam hal jumlah dan kualitas guru. Rasio guru–murid yang tinggi (1:17,8) menandakan beban kerja yang lebih berat dibandingkan wilayah lain. Kekurangan guru bersertifikasi di wilayah ini menyebabkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa relatif lebih rendah.

Kondisi tersebut memperkuat pandangan Rawls (1971) tentang perlunya difference principle – yaitu alokasi sumber daya lebih besar bagi kelompok yang paling kurang beruntung agar tercipta keadilan sosial. Dalam konteks ini, redistribusi

guru bersertifikasi dan peningkatan kompetensi di wilayah tertinggal menjadi strategi penting untuk mencapai educational equity.

4. Kesenjangan Digital dan Kapabilitas Peserta Didik
Transformasi digital merupakan salah satu dimensi penting dalam keberhasilan kebijakan pendidikan di era modern. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Subang (2025), sekitar 62% sekolah memiliki koneksi internet stabil, dan hanya 45% yang menggunakan Learning Management System (LMS) dalam kegiatan pembelajaran.

Tabel 5. Tingkat Digitalisasi Sekolah di Kabupaten Subang, 2025

Indikator Digitalisasi	Persentase Sekolah	Catatan
Koneksi Internet Stabil	62,0%	Didominasi wilayah perkotaan
Pemanfaatan LMS	45,2%	Terbatas pada sekolah unggulan
Kepemilikan Perangkat TIK Guru	78,4%	Tidak semua mampu menggunakan
Guru Literasi Digital Lanjut	38,6%	Mayoritas berada di Subang Tengah

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, 2025 (diolah).

Data menunjukkan bahwa guru dengan literasi digital lanjut hanya mencapai 38,6%, dan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Subang Tengah. Kondisi ini memperkuat ketimpangan kemampuan pedagogi digital yang berdampak langsung terhadap pemerataan kualitas pembelajaran. Kesenjangan digital ini berdampak langsung terhadap kemampuan guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Sekolah yang memiliki koneksi internet baik menunjukkan tingkat partisipasi dan prestasi belajar lebih tinggi, terutama dalam kegiatan berbasis proyek dan kompetisi akademik daring.

Menurut Van Dijk (2020), kesenjangan digital terdiri atas tiga lapisan: (1) akses teknologi, (2) keterampilan penggunaan, dan (3) hasil pemanfaatan teknologi. Subang menghadapi kesenjangan pada ketiga lapisan tersebut, yang secara kumulatif menurunkan efektivitas kebijakan pendidikan gratis dalam mengembangkan kapabilitas peserta didik.

Studi UNESCO (2024) menunjukkan bahwa tanpa investasi dalam literasi digital, kebijakan pendidikan gratis berisiko menciptakan kesetaraan semu – akses terbuka tetapi tidak diiringi kemampuan memanfaatkan peluang belajar. Kondisi ini juga terlihat di Subang, di mana siswa di sekolah digital-ready menunjukkan hasil belajar lebih baik dibandingkan sekolah tanpa infrastruktur digital.

5. Sintesis Hasil Kuantitatif
Untuk mempermudah interpretasi, Tabel 6 menyajikan ringkasan capaian tiga indikator utama kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang.

Tabel 6. Ringkasan Capaian Utama Kebijakan Pendidikan Gratis Kabupaten Subang, 2024–2025

Dimensi Evaluasi	Indikator	Capaian	Status
Efektivitas	APM SD: 99,3%; APM SMP: 97,3%; APS menurun di semua jenjang	Cukup tinggi	Efektif
Pemerataan	IPE = 0,82; Disparitas antarwilayah signifikan (Utara vs Selatan)	Moderat	Belum merata
Kapabilitas	62% sekolah berinternet stabil; 45% memanfaatkan LMS; 38% guru literasi digital tinggi	Rendah–Sedang	Perlu peningkatan

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang efektif dalam memperluas akses pendidikan, namun belum berhasil mewujudkan pemerataan mutu dan pengembangan kapabilitas peserta didik secara menyeluruh.

Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan gratis tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen pemerataan tanpa kebijakan pendukung di bidang distribusi tenaga pendidik, pengembangan fasilitas, dan transformasi digital sekolah.

B. Pembahasan

1. Integrasi Teoretis: Rawls, Sen, dan Dunn dalam Evaluasi Kebijakan

Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang dapat dipahami sebagai upaya negara memenuhi prinsip keadilan sosial sebagaimana diuraikan oleh John Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice*. Rawls menekankan dua prinsip utama keadilan: *equal basic liberties* dan *difference principle*. Prinsip pertama menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan; prinsip kedua mengharuskan kebijakan publik memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks Subang, prinsip ini menuntut prioritas bagi wilayah selatan yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik.

Namun, keadilan akses (aksesibilitas pendidikan) belum otomatis menjamin keadilan hasil (*equity of outcomes*). Di sinilah relevansi Amartya Sen (1999) melalui *Capability Approach*. Sen menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari distribusi sumber daya atau input semata, melainkan sejauh mana individu memiliki *capabilities* – kemampuan nyata untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan kebijakan.

Kebijakan pendidikan gratis di Subang telah memperluas *functionings* dasar (siswa dapat bersekolah tanpa biaya), tetapi belum sepenuhnya memperkuat *capabilities* karena masih terdapat kesenjangan digital dan ketimpangan mutu antarwilayah. Guru di daerah tertinggal tidak memiliki peluang pengembangan kompetensi yang sama dengan guru di perkotaan. Hal ini menyebabkan efek kebijakan tidak merata dan berpotensi melanggengkan ketimpangan hasil belajar.

Subang belum dapat dikategorikan sebagai daerah dengan kebijakan pendidikan yang bersifat *capability-expanding* karena faktor konversi—seperti keterbatasan

infrastruktur digital dan kompetensi guru—masih membatasi transformasi sumber daya menjadi kapabilitas nyata siswa.

Dalam perspektif William Dunn (2018), proses implementasi kebijakan harus dianalisis melalui empat tahap evaluatif: input, proses, output, dan outcome.

Input kebijakan pendidikan gratis di Subang sudah kuat melalui BOS, BOSDA, dan dukungan regulasi.

Proses implementasi menunjukkan distribusi anggaran dan tenaga pendidik belum merata.

Output berupa peningkatan APM dan penurunan APS tercapai.

Namun, outcome berupa pengembangan kapabilitas dan pemerataan kualitas masih terbatas.

Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif pada dimensi input dan output, tetapi belum optimal pada dimensi outcome.

2. Ketimpangan Wilayah dan Prinsip Keadilan Diferensial

Menurut teori *cumulative causation* Gunnar Myrdal (1957), ketimpangan regional cenderung bersifat kumulatif – wilayah yang lebih maju menarik lebih banyak sumber daya, memperlebar kesenjangan dengan wilayah tertinggal. Pola ini tampak jelas di Subang: wilayah tengah dan utara memiliki rasio guru bersertifikasi dan fasilitas pendidikan lebih tinggi dibanding selatan.

Berdasarkan hasil perhitungan IPE (0,82) dan data distribusi guru bersertifikasi, ketimpangan spasial di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa alokasi sumber daya pendidikan masih mengikuti logika efisiensi, bukan keadilan diferensial. Guru dan fasilitas masih banyak ditempatkan di wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik, bukan di daerah yang paling membutuhkan. Kondisi ini perlu dikoreksi melalui kebijakan afirmatif berupa redistribusi guru bersertifikasi, pelatihan intensif, serta investasi fasilitas digital di wilayah selatan, sejalan dengan prinsip *difference principle* Rawlsian.

Dalam kerangka *difference principle* Rawlsian, situasi ini perlu dikoreksi dengan kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas distribusi guru bersertifikasi, pelatihan intensif, dan investasi fasilitas digital ke wilayah selatan. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip *progressive equity* yang diadopsi UNESCO (2024) dalam laporan *Global Education Monitoring*.

3. Dimensi Digitalisasi dan Kapabilitas Pendidikan

Pendidikan di abad ke-21 menuntut integrasi teknologi digital dalam proses belajar. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan di Subang masih terbatas: hanya 62% sekolah memiliki koneksi internet stabil dan 45% menggunakan LMS.

Temuan ini mengonfirmasi argumen Van Dijk (2020) dan Warschauer (2018) bahwa *digital divide* bukan hanya masalah akses perangkat, melainkan juga keterampilan dan hasil pemanfaatannya. Di Subang, kesenjangan digital berdampak pada terbatasnya kemampuan siswa dalam mengembangkan literasi informasi, berpikir kritis, dan kolaborasi daring – kompetensi penting dalam *21st century learning*.

Lebih lanjut, Sen (1999) menegaskan bahwa kebijakan publik yang berorientasi pada kapabilitas harus memperhatikan *conversion factors*, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana individu mengubah sumber daya menjadi hasil yang bermakna. Dalam konteks pendidikan digital, faktor tersebut mencakup kompetensi guru, dukungan infrastruktur, dan konteks sosial budaya sekolah.

Dengan demikian, pendidikan gratis di Subang belum sepenuhnya menjadi *capability-expanding policy* karena

konversi sumber daya (gratis biaya sekolah) ke kapabilitas nyata (kemampuan belajar dan berinovasi) masih terbatas.

4. Efektivitas dan Tata Kelola Kebijakan

Dari perspektif efektivitas kebijakan, keberhasilan pendidikan gratis di Subang didukung oleh stabilitas pendanaan dan sinergi antarlevel pemerintahan (pusat–provinsi–daerah). Namun, tata kelola pelaksanaan program masih menghadapi kendala transparansi dan konsistensi data.

Evaluasi laporan BOS menunjukkan bahwa sebagian sekolah masih melakukan pelaporan secara manual, sehingga rawan keterlambatan dan kesalahan input. Implementasi sistem e-BOS (electronic BOS) yang terintegrasi antarinstansi menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran, sejalan dengan prinsip good governance dalam tata kelola pendidikan. Prinsip good governance dalam pendidikan – transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi – menjadi fondasi untuk memperbaiki efektivitas jangka panjang kebijakan pendidikan gratis.

5. Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Temuan penelitian ini menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan dua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) utama, yaitu SDG 4 tentang Quality Education dan SDG 10 tentang Reduced Inequalities. Pada SDG 4, fokus utama adalah menjamin pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas bagi semua. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Subang menunjukkan kemajuan nyata dalam pencapaian target 4.1, yakni “menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, adil, dan berkualitas.” Namun demikian, masih adanya kesenjangan digital antarwilayah serta ketimpangan distribusi guru bersertifikasi menunjukkan bahwa target 4.c—yang menekankan peningkatan jumlah guru berkualitas, termasuk melalui pelatihan dan pemerataan penempatan—belum sepenuhnya tercapai.

Sementara itu, hasil penelitian ini juga berkontribusi langsung terhadap SDG 10 yang menyoroti pengurangan ketimpangan dalam dan antarwilayah. Ketimpangan fasilitas pendidikan antara Subang Tengah yang relatif maju dan Subang Selatan yang masih tertinggal menunjukkan adanya tantangan serius dalam mencapai keadilan spasial di sektor pendidikan. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan afirmatif dan redistribusi sumber daya pendidikan yang berpihak pada wilayah dan kelompok sosial yang kurang beruntung, sejalan dengan prinsip difference principle Rawls tentang keadilan sosial.

Dengan demikian, penguatan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang memiliki implikasi strategis terhadap pencapaian dua agenda global tersebut. Melalui pendekatan berbasis keadilan distributif, pemerataan digital, dan pengembangan kapabilitas siswa, kebijakan pendidikan gratis tidak hanya menjadi instrumen lokal untuk peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terwujudnya pendidikan berkualitas dan pengurangan ketimpangan sebagaimana diamanatkan dalam SDG 4 dan SDG 10.

6. Sintesis Analisis

Berdasarkan integrasi teori dan temuan empiris, dapat disimpulkan bahwa:

Kebijakan pendidikan gratis di Subang efektif meningkatkan akses, tetapi dampak pemerataan dan kapabilitas belum optimal.

Ketimpangan spasial dan digital menjadi penghalang utama keadilan hasil.

Pemerataan guru dan fasilitas merupakan determinan utama keberhasilan kebijakan.

Digital literacy adalah faktor baru yang menentukan konversi pendidikan gratis menjadi kapabilitas nyata.

Transformasi kebijakan diperlukan dari sekadar cost-elimination policy menuju capability-enhancement policy.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Subang tahun ajaran 2024–2025 telah menunjukkan hasil positif dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Data menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang serta penurunan Angka Putus Sekolah (APS), yang menandakan efektivitas kebijakan dalam menghapus hambatan biaya pendidikan. Namun demikian, pemerataan mutu dan pengembangan kapabilitas peserta didik belum sepenuhnya tercapai.

Indeks Pemerataan Pendidikan (IPE) Kabupaten Subang tercatat sebesar 0,82, yang menunjukkan pemerataan relatif tinggi, tetapi masih terdapat ketimpangan spasial antarwilayah, terutama di Subang Selatan. Selain itu, aspek kapabilitas digital masih menjadi tantangan signifikan: hanya 62% sekolah yang memiliki koneksi internet stabil, 45% yang memanfaatkan Learning Management System (LMS), dan 38% guru yang memiliki literasi digital tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis belum sepenuhnya menjadi capability-expanding policy sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen.

Secara teoretis, kebijakan ini telah memenuhi prinsip equality of access (Rawls), tetapi belum mencapai equity of outcomes dan perlu memperluas kapabilitas siswa secara substantif. Evaluasi berdasarkan kerangka Dunn menunjukkan bahwa keberhasilan pada tahap input dan output belum diimbangi dengan pencapaian outcome yang inklusif dan berkeadilan.

Saran Penelitian Lanjutan

Untuk memperdalam temuan penelitian ini, disarankan agar penelitian lanjutan:

Menggunakan pendekatan mixed methods dengan menggabungkan survei lapangan dan wawancara mendalam agar validitas hasil meningkat. Pendekatan mixed methods perlu dikombinasikan dengan teknik kualitatif untuk menyediakan triangulasi, memperkuat validasi temuan, dan memberikan kedalaman analisis terhadap konteks implementasi kebijakan. Integrasi kuantitatif–kualitatif memungkinkan peneliti memahami tidak hanya pola ketimpangan, tetapi juga mekanisme sosial dan institusional yang menjelaskan mengapa disparitas muncul antarwilayah.

Mengembangkan analisis spasial berbasis GIS guna memetakan ketimpangan pendidikan secara visual dan interaktif.

Meneliti hubungan antara digital literacy, hasil belajar, dan pemerataan pendidikan dalam jangka panjang melalui pendekatan longitudinal.

Dengan langkah-langkah ini, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi penyusunan kebijakan pendidikan inklusif dan berkeadilan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrett, A., Chawla-Duggan, R., Lowe, J., Nikel, J., & Ukpo, E. (2019). *The concept of quality in education: A review of the international literature on the concept of quality in education*. Bristol University Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. (2024). *Statistik pendidikan dan kemiskinan Kabupaten Subang 2024*. Subang: BPS Kabupaten Subang.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. (2025). *Laporan statistik pendidikan tahun 2024–2025*. Subang: Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *The economics of education: A comprehensive overview*. Elsevier.
- Le, M. T., & Pham, H. N. (2024). Digital inequality and education outcomes in rural Vietnam: Lessons for equitable access. *Asia Pacific Journal of Education*, 44(2), 205–223.
<https://doi.org/10.1080/02188791.2024.2305121>
- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and under-developed regions*. Gerald Duckworth & Co.
- Nugraha, R., & Lestari, F. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dana BOS di sekolah dasar. *Jurnal Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Pendidikan*, 12(3), 211–225.
- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458.
<https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Putri, A. N., & Hartono, Y. (2020). Pemerataan fasilitas pendidikan dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 134–146.
- Rahmi, S., & Setiawan, T. (2023). Profesionalisme guru dan kualitas hasil belajar: Analisis empiris pada sekolah menengah di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 45–59.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sari, D. K., & Hidayat, A. (2023). Evaluasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kulon Progo: Perspektif keadilan sosial. *Jurnal Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 33–51.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sukmawati, D., & Yulianti, R. (2021). Digitalisasi pendidikan di sekolah dasar: Tantangan dan solusi. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Pendidikan*, 5(4), 289–302.
- UNESCO. (2022). *Digital learning and equity: Global report 2022*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2024). *The global education monitoring report 2024: Technology and the future of learning*. Paris: UNESCO Publishing.
- Van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity Press.
- Warschauer, M. (2018). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. MIT Press.
- Zhao, Y., & Watterston, J. (2023). The rise of AI in education: Balancing innovation and equity in digital learning. *Computers & Education*, 205, 104901.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104901>